

**KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS PENGATURAN KRITERIA
KELAYAKAN PROYEK *BLUE BOND* BERDASARKAN POJK NO. 18 TAHUN
2023 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT
UTANG DAN SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN**

Oleh

Muthia Zahra Qurraatha Aini, NIM 2214101136

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 serta bentuk kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Sebagai perbandingan, penelitian ini juga menelaah pengaturan *Blue Bond* di Republik Seychelles yang telah diatur secara lebih rinci dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* di Indonesia masih mengarah pada proyek hijau, sedangkan Republik Seychelles memiliki kriteria kelayakan proyek yang lebih jelas dan terstruktur pada tujuan *blue project*. Kemudian, (2) Bentuk kepastian hukum bagi investor atas ketidakjelasan pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* di Indonesia belum memberikan kekuatan hukum yang memadai, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum menetapkan parameter yang jelas mengenai *Blue Bond*, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Sebaliknya, pengaturan *Blue Bond* di Republik Seychelles telah mengatur kriteria kelayakan proyek secara lebih rinci, terukur, dan transparan, sehingga mampu memberikan tingkat kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor.

Kata Kunci: *Blue Bond*, Kriteria, Kepastian Hukum, Indonesia, Republik Seychelles

**LEGAL CERTAINTY FOR INVESTORS REGARDING THE REGULATION OF
BLUE BOND PROJECT ELIGIBILITY CRITERIA UNDER FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK) NO. 18 OF 2023 ON THE
ISSUANCE AND REQUIREMENTS OF SUSTAINABILITY-LINKED DEBT
SECURITIES AND SUKUK**

By

Muthia Zahra Qurraatha Aini, NIM 2214101136

Department of Law and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of eligibility criteria for Blue Bond projects under Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK) Number 18 of 2023 and the form of legal certainty for investors in Indonesia. As a comparison, this study also examines the regulation of Blue Bonds in the Republic of Seychelles, which has been regulated in a more detailed and comprehensive manner. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a comparative approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials as the basis for analysis. (1) The results of the study indicate that the eligibility criteria for Blue Bond projects in Indonesia are still oriented toward green projects, whereas the Republic of Seychelles has clearer and more structured eligibility criteria specifically directed toward blue projects. (2) Furthermore, the form of legal certainty for investors regarding the unclear regulation of Blue Bond project eligibility criteria in Indonesia has not yet provided adequate legal protection. The existing provisions remain general in nature and have not established clear parameters for Blue Bonds, thereby potentially leading to differing interpretations. In contrast, the regulation of Blue Bonds in the Republic of Seychelles sets out project eligibility criteria in a more detailed, measurable, and transparent manner, thus providing a higher level of legal certainty and stronger protection for investors.

Keywords: *Blue Bond, Criteria, Legal Certainty, Indonesia, Republik Seycheles*